

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai Demokrasi di Indonesia sangat dijunjung tinggi sebagai opsi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tak hanya melibatkan pemerintah namun mengikutsertakan rakyat baik itu dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung. Sistem demokrasi diberlakukan membuat rakyat memiliki keberadaan penting yaitu berupa hak memilih dalam mencapai tujuan negara. Salah satu implementasi demokrasi yang telah terselenggara adalah pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum dibutuhkan suara rakyat untuk memilih wakil rakyat yang adil dan amanah serta dapat mencapai perbaikan dalam kehidupan bernegara. Pemilu dilakukan tidak terlepas dari partisipasi dan peran partai politik. Partai politik hingga saat ini memainkan peran penting dalam sistem politik Indonesia karena mereka berfungsi sebagai pusat proses demokrasi. (Prima, 2018). Beberapa individu yang berpendapat bahwa partai politik menentukan demokrasi, kualitas demokrasi bergantung pada seberapa besar peran dan fungsi partai politik, seperti yang terlihat di Indonesia, di mana partai politik dianggap sebagai pilar utama demokrasi (Tompondung, Monalisa C. Tumanduk, 2022). Partai Politik adalah sekelompok organisasi yang terbentuk secara sukarela dengan tujuan bersama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga bertujuan untuk menjaga kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dan et al., 2022). Partai politik dibentuk untuk memperoleh kekuasaan baik di lembaga eksekutif dan legislatif, partai politik tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan karena keduanya memiliki keterkaitan dalam mencapai tujuan bernegara (Miftah, 2012).

Partai politik memiliki sumber keuangan yang salah satunya bersumber dari APBN/APBD sehingga desus tentang akuntabilitas dan transparansi menarik perhatian untuk dikaji permasalahannya. Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018, yang mengatur besaran bantuan keuangan partai politik, fenomena bantuan keuangan partai

yang mengatur jumlah besaran bantuan dana partai politik (Nurimansyah & Ariyani, 2020). Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR dinaikkan menjadi Rp 1.000,00/suara sah. Serta besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00/suara sah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1, 2018). Kenaikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN ini menjadi problematika banyak kalangan karena tidak semua partai politik memiliki bukti pertanggungjawaban dana bantuan yang sah (Sukmana, 2019).

Berdasarkan pernyataan *Transparency International Indonesian* tentang transparansi dan akuntabilitas menyatakan bahwa persoalan yang banyak terjadi hingga saat ini adalah keuangan partai politik (Rizki, 2022). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bahwa partai politik berada diposisi terakhir dari 12 institusi yang berada dalam daftar dengan tingkat kepercayaan hanya 54% (LSI, 2022). Survei yang dilakukan dapat memberikan pandangan bahwa rendahnya tata kelola partai yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat.

Rakyat telah "menghibahkan" suaranya untuk kesuksesan partai politik, memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menjadi wadah aspirasi sehingga rakyat memiliki hak untuk menuntut partai politik untuk lebih transparan. Semakin transparan partai politik, semakin banyak masyarakat yang dapat melihat bagaimana dana bantuan negara dialokasikan (M. Said, 2020). Sejak reformasi bergulir terutama pasca pemilu 2004 terdapat fenomena yang menghambat kemajuan partai politik yaitu kasus korupsi, politik uang dan rapuhnya politik representasi (Wahyuningroem, 2021). Kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menarik perhatian publik. Korupsi yang dimaksud adalah korupsi yang dilakukan oleh 14 anggota DPRD Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada awal 2020 (Oktaryal & Hastuti, 2021). Kasus 10 anggota DPRD yang ditahan oleh KPK pada tanggal 19 Oktober 2021 (Kamil, 2021). Kasus wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 15 Desember 2022 (Pratama, 2023).

Tingginya kasus korupsi yang melibatkan politisi perlu adanya peningkatan kesadaran untuk memperbaiki tata kelola politik, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali partai politik harus segera memperbaiki sistemnya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi menjadi instrument untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tugas dan fungsi penting serta tujuan organisasi. (Edowai et al., 2021). Membuat laporan keuangan yang baik adalah salah satu bentuk partai politik bertanggungjawab atas keuangan yang diterima (Nurimansyah & Ariyani, 2020). Laporan keuangan dapat dilihat dari program kerja yang dijalankan partai dalam satu periode (Natasyah, 2018).

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Andini et al., 2020) bahwa penyajian laporan keuangan dapat menjadikan suatu organisasi lebih akuntabel dan transparan, serta para pengguna dapat melihat aktivitas program kerja dan anggaran yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban. (Karmila, 2019).

Apabila prinsip akuntabilitas tidak diterapkan, partai politik tidak hanya akan terkena penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi karena partai politik dengan tata kelola yang buruk dapat dipastikan tidak akan berhasil mengelola negara dan pemerintahan. (Nahuddin, 2015). Partai sebagai organisasi publik harus memenuhi standar akuntabilitas sebagai bagian dari skala *good governance* (Zuryani et al., 2016). akuntabilitas partai politik dalam pertanggungjawaban keuangan sangat berkontribusi pada pelaksanaan tata kelola partai politik yang baik (*good party governance*).

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang berafiliasi pada agama (Islam) dan memiliki basis yang kuat di komunitas pesantren tradisional, terutama di Jawa timur. PKB adalah salah satu dari beberapa partai islam di Indonesia yang mengalami peningkatan suara yang signifikan, hal ini berbeda dengan partai islam lainnya yang perolehan suaranya tetap sama atau tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2009, PKB mendapat suara sebesar 5.146.122 (4,98%). Pemilu tahun 2014, jumlah suara PKB naik menjadi 11.298.957 (9,04%), dan pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 13.570.097 (9,69 persen) atau secara presentase jumlah suara naik sebesar 4,71 % (Kominfo, 2019).

Penelitian mengenai pertanggungjawaban keuangan partai oleh peneliti terdahulu yang dilakukan Andini et al (2020) menyatakan bahwa Prinsip transparansi terkait pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra dapat diakses melalui website resmi sehingga dapat dikatakan bahwa partai Gerindra sudah menerapkan sistem transparansi. Namun peneliti terdahulu juga menyatakan tidak semua partai politik dapat transparan dan menerapkan sistem akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurimansyah & Ariyani, 2020) menyatakan bahwa tidak ada mekanisme yang transparan dalam pengelolaan keuangan Partai Demokrat Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat mengakses informasi melalui media atau metode lain.

Membentuk akuntabilitas partai politik membutuhkan durasi yang lama dan perlu dilakukan secara konsisten. Melihat fenomena secara keseluruhan dan peningkatan total perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa tentunya akan ada peningkatan bantuan keuangan disertai dengan tanggung jawab yang semakin besar. Peneliti ingin mengkaji transparansi dan akuntabilitas DPC PKB Kabupaten Bondowoso mengenai implementasi pertanggungjawaban tentunya mengacu pada aturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dikemas dalam sebuah karya skripsi yang berjudul **“Implementasi Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar *Good Party Governance* (Studi Kasus DPC PKB Bondowoso)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban keuangan Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bondowoso?
2. Apa saja kendala yang dialami Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bondowoso dalam pertanggungjawaban keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pertanggungjawaban keuangan Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bondowoso.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Dewan Perwakilan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bondowoso dalam pertanggungjawaban keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari dilakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan partai sebagai berikut :

1. Bagi DPC PKB Bondowoso

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertanggungjawaban keuangan partai sesuai regulasi sehingga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola partai yang baik.

2. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir dan menambah ilmu bagaimana tentang implementasi pertanggungjawaban keuangan partai yang baik serta pada DPCPKB Bondowoso.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan dalam memperoleh materi yang sejenis.